

KONSEP KEPEMIMPINAN BERBASIS BUDAYA ISLAM-JAWA

Mulyono

*Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Gajayana
No. 50 Malang. HP. 081-334691166, e-mail: mulyonouin@gmail.com*

Abstract

Leadership concept base on Java-Islamic culture, one of them stem from Wali Songo representing leadership concept having the character of integratif, as which for king title of Demak: Sayyidin Panata Gama, Senopati Ing Ngalogo, Kalifatullah Fil-Ardh (Power arranging religion, Commander in God Proxy and battlefield under the sun). Conception leadership of the integartif depicts ambitious Java society have leader representing solidarity between religion figure / moslem scholar, war lord and king. Despitefully rich Java cultures have leadership values which in form of solid and brief expressions is full of meaning. At era democratize and area autonomy in this time, conception and leadership value base on Java culture is righteously re-studied as means accomodate dynamics of pluralitas society of Nusantara, so that have position bargaining in leadership of modern Indonesia.

Key words: *concept, assess, leadership, base, Java-Islamic culture*

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan suatu subjek yang sudah lama diminati para ilmuwan maupun orang awam. Istilah tersebut berisi

konotasi tentang citra individu-individu yang berkuasa dan dinamis yang memimpin armada yang menang perang, yang mengendalikan kerajaan-kerajaan korporasi dari atas gedung-gedung pencakar, atau yang mengarahkan tujuan bangsa-bangsa.

Kebanyakan dari uraian kita mengenai sejarah berupa cerita tentang pemimpin-pemimpin militer, politik, agama, dan sosial. Kehebatan-kehebatan dari para pemimpin yang berani merupakan inti dari banyak legenda serta mitos. Kekaguman yang meluas mengenai kepemimpinan merupakan suatu proses yang demikian misterius dan menyangkut kehidupan banyak orang. Mengapa beberapa orang pemimpin tertentu (Nabi Muhammad SAW, Mao Tse-tung, Gandhi) dapat menimbulkan semangat dan dedikasi yang demikian mendalam? Bagaimanakah pemimpin-pemimpin tertentu (Iskandar Agung, Julius Caesar, Charlemagne) membangun kerajaan-kerajaan yang demikian besar? Mengapa pemimpin-pemimpin tertentu (Winston Churchill, Indira Gandhi, Soekarno, Soeharto, Gus Dur) mendadak dijatuhkan, walaupun kelihatannya mempunyai kekuasaan serta mempunyai catatan prestasi yang baik? Mengapa orang-orang tertentu yang kurang dikenal (Adolf Hitler, Claudius Caesar) beranjak ke posisi yang mempunyai kekuasaan yang besar? Mengapa pemimpin-pemimpin tertentu mempunyai pengikut-pengikut yang setia yang bersedia untuk mengorbankan hidupnya bagi pemimpin tersebut, sedangkan pemimpin-pemimpin lainnya sedemikian dibencinya sehingga para pengikut mereka berkomplot untuk membunuh mereka? (Yukl, 1998: 1).

Pasca Pemilihan Legislatif pada Kamis, 9 April 2009, masyarakat Indonesia ramai memperbincangkan siapa pemimpin Nasional RI periode 2009-2014? Banyak diskusi dan banyak masukan, namun perbincangan pada akhirnya meruncing pada dua hal, yaitu idealnya pasangan pemimpin RI adalah dari Jawa dan luar Jawa serta Militer dan Sipil-Religius. Namun dalam kenyataannya, partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat pada akhirnya menentukan pasangan Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (Pacitan) dan Boediono (Blitar) yang keduanya berasal dari Jawa Timur.

Banyak sindirian dan ejekan pada awalnya mengapa SBY memilih Boediono yang bukan dari kalangan tokoh parpol. Diantara ejekan dari lawan politik dikatakan pasangan ini tak ubahnya dengan Pilkada. Namun hasil Pilpres pada Rabu, 8 Juli 2009 menunjukkan kemenangan pasangan SBY-Boediono yang sama-sama dari Jawa.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Jawa menjadi sumber pemimpin nasional? Adakah hubungan antara budaya dan kepemimpinan dalam suatu masyarakat/negara? Kalau kita mengamati lebih mendalam ternyata memang sangat erat antara nilai budaya dan keahlian utama masyarakat. Budaya Jawa sejak zaman dahulu dikenal mampu melahirkan pemimpin Nusantara mulai dari Ken Arok, raja-raja Majapahit hingga Soekarno dan SBY. Budaya Sunda telah banyak melahirkan ahli-ahli seni (musik) dan sekarang para penyanyi dan kaum selebritis. Budaya Padang Panjang dan Banjar banyak melahirkan ulama/tokoh agama Islam. Budaya Madura, Bugis dan Minang melahirkan orang-orang yang gigih dalam bekerja dan kaum wirausahawan. Budaya Batak banyak melahirkan orang-orang perantau, sekarang banyak melahirkan pengacara dan sopir-sopir ulung. Budaya Bali banyak melahirkan orang-orang seniman tari, lukis dan pahat serta memiliki kearifan dalam penataan lingkungan hidup. Budaya Aceh sejak dulu melahirkan ulama yang gigih dalam perjuangan. Di samping itu juga ada budaya dari beberapa suku di Indonesia yang kurang menghargai etos kerja dan semangat belajar tinggi karena suka hura-hura dan mabuk-mabukan serta sekarang mereka banyak yang berprofesi sebagai ahli demo, protes dan kaum bentrok karena didasari pada sifat iri atas keberhasilan pihak lain. Karena luasnya kajian, maka dalam artikel ini penulis memfokuskan pada pembahasan konsep kepemimpinan berbasis budaya Islam-Jawa.

Konsep Kepemimpinan Berbasis Budaya Islam-Jawa

Jawa adalah salah satu etnik terbesar di Indonesia yang memiliki banyak kearifan lokal, salah satunya dalam konsep kepemim-

pinan. Bahkan soal ini mendapat perhatian yang cukup serius. Karena, antara lain, ia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ideal yang berorientasi kepada dunia supranatural. Katakanlah semacam dewa, Tuhan, dan lainnya. Hal itu, antara lain, tercermin dalam pandangan orang Jawa terhadap pemimpin, raja misalnya, yang dianggap sebagai “wakil/titisan” Tuhan di muka bumi. Tugas mulia seorang pemimpin ini terutama menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Di mana salah satu pilar utama hidup harmonis itu adalah keadilan.

Oleh karenanya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam praksis kehidupan. Orang-orang yang dipimpin harus mendapatkan rasa adil dan kesejahteraan lahir dan batin. Dalam konteks ramainya kontes pemilihan pemimpin, tingkat lokal dan nasional belakangan ini, mungkin baik menakar bagaimana budaya atau kearifan lokal menawarkan standar kepemimpinan idealnya (Hidayat, 2008).

Pada zaman Hindu Budha telah mewariskan konsep kepemimpinan yang begitu terkenal hingga sekarang yaitu Hasta Brata (delapan watak kepemimpinan). Kemudian sejarah telah mencatat bahwa setelah Islam masuk ke Nusantara dan sejak akhir abad ke-15 telah menjadi kekuatan politik yaitu munculnya satu kerajaan Islam pertama Jawa yang bernama Demak Bintoro, maka muncul konsep kepemimpinan yang bersifat integratif, yaitu: *Sayyidin Panata Gama, Senopati Ing Ngalogo, Khalifatullah Fil-Ardh* (Penguasa yang mengatur agama, Panglima di medan perang dan Wakil Tuhan di bumi). Inilah gelar yang diberikan Wali Songo ketika melantik Raden Patah menjadi Raja Islam pertama di Kerajaan Demak. Betapa sempurnanya gelar tersebut sebagai ganti istilah “Prabu” sebagai gelar raja-raja yang menjadi tradisi pada zaman Hindu dan Budha seperti Prabu Brawijaya, gelar raja Majapahit.

Betapa arif bijaksananya Wali Songo memberikan gelar pada penguasa Islam yang tidak serta merta menggunakan istilah yang umum digunakan para penguasa Islam di Timur Tengah saat itu yaitu menggunakan sebutan “Khalifah” dan “Amir”. Gelar peng-

uasa Islam tersebut kemudian lebih dipersingkat dengan istilah "Sulthon" artinya "Penguasa", maka lahirlah seseorang para raja Islam, seperti: Sultan Fatah, Sultan Trenggana, Sultan Hadiwijaya, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Hasanuddin, dan sebagainya. Bagi orang Jawa, mereka ingin memiliki pemimpin yang merupakan perpaduan antara tokoh agama/ulama, panglima perang dan raja. Dengan perpaduan itu diharapkan akan lahir pemimpin yang taat dalam beragama sekaligus dapat mengatur masalah-masalah kehidupan beragama, memiliki jiwa pemberani dan pilih tanding sebagai panglima perang sekaligus bijaksana dan adil sebagai raja/penguasa.

Masyarakat Jawa mengharapkan pemimpin seperti itu karena budaya Jawa yang memang menghendaki pemimpin selain memimpin negara juga menjadi pemimpin agama sekaligus panglima perang yang kemudian konsep ini menjadi salah satu pasal dalam UUD 1945 bahwa presiden sebagai panglima tertinggi atas TNI dan Polri. Gelar "ideal" tersebut secara implisit nampaknya ingin diterapkan ketika Presiden Soeharto berkuasa, namun beliau menyadari ada satu kekurangan untuk menyandang gelar tersebut yaitu bidang agama. Maka kekurangan tersebut, beliau sempurnakan pada tahun 1975 walaupun sudah ada Departemen Agama mendorong lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga agama non-birokrasi yang diketuai Prof. Hamka dan langsung di bawah pertanggungjawaban Presiden dan sekaligus mendirikan Yayasan Muslim Pancasila yang hingga akhir kekuasaannya, 21 Mei 1998 telah mampu membangun masjid lebih dari 900 buah di seluruh pelosok tanah air bahkan di luar negeri. Satu prestasi luar biasa yang belum pernah dapat tertandingi dalam sejarah penguasa Islam walaupun Pak Harto dan Indonesia bukan menyatakan diri sebagai pemimpin Islam. Di samping itu sepulang haji bersama keluarga dan beberapa menteri pada 1990, penguasa Orde Baru tersebut melengkapi namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto, sekaligus pada 1992 juga merestui lahirnya ICMI yang dipimpin BJ. Habibie walaupun sudah ada ormas-ormas Islam seperti NU dan Muham-

madiyah. Ini juga mencerminkan adanya niat kuat Presiden Soeharto menerapkan gelar lengkap bangsawan Jawa tersebut. Dan memang betapa idealnya apabila para pemimpin negeri ini baik dari pimpinan paling atas hingga tingkat bawah maupun organisasi-organisasi termasuk di lingkungan lembaga pendidikan memiliki pemimpin yang mampu mengimplementasikan tiga gelar tersebut yaitu pemimpin agama, pemimpin perang/mampu mengatasi segala rintangan/kesulitan organisasi sekaigus sebagai pemimpin birokrasi/lembaga.

Nilai Kepemimpinan Berbasis Budaya Islam-Jawa

Diantara nilai-nilai kepemimpinan berbasis budaya Islam-Jawa seringkali melalui ungkapan-ungkapan yang bersifat padat dan penuh makna sehingga untuk mengungkapkan kandungannya perlu ada penafsiran-penafsiran oleh para ahlinya. Dalam artikel ini dijelaskan beberapa ungkapan yang mengandung nilai kepemimpinan penting dalam budaya Islam-Jawa. Karena terbatasnya ruang pembahasan, maka dalam artikel ini penulis hanya dapat mengkaji tiga belas nilai kepemimpinan Islam-Jawa yang dianggap pokok saja.

1. Agama Agemaning Aji

Artinya agama busana berharga. Agama berasal dari kata *a* yang artinya tidak, *gama* yang artinya rusak. Suatu keyakinan apabila dipatuhi ajarannya tidak akan membuat pribadi dan masyarakat rusak. Agama dalam pandangan orang Jawa sama dengan busana, atau *ageman* yang berarti pakaian. *Aji* artinya raja atau mulia. Warga negara yang mulia tentu akan memperhatikan ajaran agama, ajaran leluhur para Nabi dan Rasul sebagai yang tertera dalam Kitab Suci. Kewibawaan seorang pemimpin yang dituntun oleh ajaran agama akan terbebas dari perbuatan aniaya, nista dan hina yang dapat meruntuhkan derajat dan martabatnya. Prinsip kepemimpinan bagi orang Jawa menuntut agar pemimpin selain memimpin secara for-

mal juga memimpin secara agamis, agar berkah dan adiluhung di hadapan pengikutnya. Kepemimpinan yang agamis selalu mementingkan kepentingan orang banyak dan menyantuni orang lemah. Mereka inilah yang membuat pimpinan menjadi *aji*, berarti harga yang mahal.

2. Ojo Gumunan, Ojo Kagetan lan Ojo Dhumeh

Agar setiap pemimpin memiliki sikap yang tenang dan wibawa agar masyarakatnya dapat hidup tenang dalam menjalankan aktifitasnya maka perlu memiliki falsafah: *ojo gumunan, ojo kagetan lan ojo dhumeh*. Maksudnya, sebagai pemimpin janganlah terlalu terheran-heran (*gumun*) terhadap sesuatu yang baru (walau sebenarnya amat sangat heran), tidak menunjukkan sikap kaget jika ada hal-hal diluar dugaan, dan tidak mudah terkejut ketika menerima berita. Ungkapan ini dipertegas dengan "*Aja gumunan kaya kethek mlebu kutha*", jangan mudah terkagum-kagum seperti kera masuk kota. Dan juga tidak boleh sombong (*dumeh*) dan *aji mumpung* sewaktu menjadi seorang pemimpin. Sebab, orang yang mudah kagum dan mudah terkejut adalah orang yang mudah tertipu dan mudah ditakut-takuti. Intinya falsafah ini mengajarkan tentang menjaga sikap dan emosi bagi semua orang terutama seorang pemimpin (Khakim, 2007: 79).

3. Memayu Hayuning Bawana

Artinya, pemimpin yang bijaksana berarti telah *memayu hayuning bawana*. *Ayu-hayu* dan *rahayu* menunjuk makna keselamatan. *Memayu* berarti membuat selamat. Sedangkan *bawana* adalah istilah lain untuk buana, dunia atau jagat. Upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah wujud nyata *memayu hayuning bawana*. Polusi air, tanah dan udara harus dihindari demi masa depan. Kerusakan alam membawa bencana yang amat merugikan. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan, banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang kurang memperhatikan kelestarian alam.

Seandainya sejak taman kanak-kanak ditanamkan tentang lingkungan hidup, maka Indonesia akan tampil sebagai taman sari dunia sesuai dengan konsep Jawa memayu hayuning bawana (Khakim, 2007: 80). Hal itu sudah ditunjukkan kecantikan pulau Bali sebagai salah satu icon pariwisata di negeri ini yang mana masyarakatnya memiliki kearifan lokal dalam penataan lingkungan hidup.

4. Songsong Gilap Payung Agung

Maksudnya, wewenang atau kepemimpinan yang bersumber dari *pulung* atau kederajadan yang diperoleh karena sudah ketentuan/takdir Allah maka kepemimpinannya menjadi wibawa dan kharismatik. Untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan seseorang itu berwibawa dan kharismatik dalam budaya Jawa khususnya pada pendopo-pendopo keraton maupun kadipaten ada sejumlah barisan berbagai benda pusaka salah satunya berupa payung. Payung itulah sebagai perlambang *songsong gilap payung agung*. Pulung sebagai sumber kepemimpinan diyakini hanya melekat pada satu orang. Pulung yang “jatuh” pada seorang pemimpin tak ubahnya dengan wahyu yang turun kepada para nabi dan rasul dalam konsep Islam. Dimana pulung atau wahyu tidak terbagi-bagi dan tetap utuh wujudnya, merupakan hak prioritas milik seseorang yang terpilih, sedang yang lain disebut pembantu atau sahabat dalam konsep sejarah Nabi Isa AS dan Muhammad SAW. Dengan demikian, seseorang yang telah mendapatkan pulung kepemimpinan itu tidak mempunyai kewajiban moral bagi dirinya untuk mengadakan distribusi wewenang, yang ada hanya konsep pembantu atau menteri atau punggawa pemerintahan. Mereka percaya bahwa kepemimpinan yang terbagi-bagi akan mengganggu harmoni alam. Kepemimpinan yang otoriter diperkenankan asal tetap pada landasan “*ambeg adil paramarta, memayu hayuning bawana.*”

5. Sukeng Tyas Yen Den Hita

Artinya, hati yang suka menerima kritik. Orang Jawa mengajarkan agar manusia bersedia menerima nasehat, kritik, teguran dari orang lain atas kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya. Demikian pula dengan pemimpin yang baik, tentunya dengan *legawa* menerima saran, usulan dan kritikan dari para pembantunya maupun rakyatnya.

6. Ambeg Adil Paramarta; Ambeg Parama Arta

Artinya, penuh rasa keadilan dan bijaksana. Setiap orang harus bersikap adil dan bijaksana dalam menghadapi persoalan hidupnya, apalagi yang berkaitan dengan orang lain. Seorang pemimpin harus pandai menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal yang lebih penting bagi kesejahteraan dan kepentingan umum.

7. Ingang Pantes Dhawah ing Sambawa Kalian Sembada

Artinya seorang pemimpin harus bertindak dan berpenampilan yang pantas serta mumpuni sesuai dengan situasi, kondisi, waktu dan tempat agar pantas dan wajar.

8. Catur Darmaning Raja

Prinsip *catur darmaning raja* adalah empat sifat utama bagi pemimpin sebagai panglima militer (*senopati ing ngalogo*), yaitu: *Jana Wisesa Suda* berarti seorang panglima militer hendaknya memiliki wawasan dan pandangan yang luas, menguasai segala macam ilmu pengetahuan, teknologi, tata prajurit kemiliteran, maupun ilmu pengetahuan agama dan spiritual secara teori maupun praktek; *Kaprahitaning Praja* berarti seorang panglima harus mempunyai perasaan belas kasihan bawahan dan berusaha mengadakan perbaikan kondisi; *Kawiryen* berarti seorang panglima harus mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip berani karena benar dan takut karena salah; *Kawi-*

bawan berarti seorang panglima harus memiliki kewibawaan terhadap rakyat, sehingga setiap perintahnya dapat dilaksanakan dan program yang direncanakan dapat terealisasi.

9. Catur Kamulyaning Nerpati

Catur Kamulyaning Nerpati adalah empat sifat utama bagi seorang negarawan, yaitu: *Jalma Sulaksana* berarti seorang pemimpin hendaknya menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu pengetahuan agama spiritual secara teori maupun praktik; *Praja Sulaksana* berarti mempunyai perasaan belas kasihan kepada rakyat dan berusaha mengadakan perbaikan kondisi masyarakat; *Wirya Sulaksana* berarti mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip berani karena benar dan takut karena salah; *Wibawa Sulaksana* berarti memiliki kewibawaan di depan rakyat sehingga setiap perintahnya dapat dilaksanakan dan program yang direncanakan dapat terealisasi.

10. Catur Praja Wicaksana

Catur Praja Wisaksana adalah empat sifat dan tindakan yang bijaksana yang hendaknya dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu: *Sama* berarti selalu waspada dan siap siaga untuk menghadapi segala ancaman gangguan/musuh baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang merongrong kewibawaan pemimpin yang sah; *Beda* berarti memberikan perlakuan yang sama dan adil tanpa perkecualian dalam melaksanakan peraturan bagi rakyat sehingga tercipta kedisiplinan dan tata tertib dalam masyarakat; *Dana* berarti mengutamakan pangan, sandang, papan/tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan fasilitas umum guna menunjang terciptanya kemakmuran rakyat secara luas serta memberikan penghargaan bagi warga yang berprestasi, di samping juga memberikan gaji bagi para pegawai sebagai balas jasa dari pengabdian dan kinerjanya yang dibebankan sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar dapat mencukupi kebutuhannya; *Danda* berarti menghukum dengan adil kepada semua yang berbuat salah/melanggar hukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya.

11. Sabda Pandhita Ratu Tan Kena Wola-Wali

Artinya, segala perkataan raja/pemimpin negara menjadi kebijakan, peraturan dan perundang-undangan negara, untuk itu selayaknya tidak boleh berubah-ubah. Demikian pula dengan raja/pemimpin, dia tidak boleh sembarangan dalam bersabda/berbicara di depan umum, dan mengambil kebijakan yang tidak boleh berubah-ubah. Seorang raja/pemimpin akan sampai pada sifat-sifat terpuji dan mulia apabila dia tidak asal bicara dan apa yang telah disabdakan tidak akan dirubah atau dikhianati, karena keputusan pemimpin akan menjadi rujukan para pembantunya. Konsep inilah yang nampaknya dianut oleh Presiden SBY dalam slogan kampanye Pilpres 8 Juli 2009 dengan istilah: "Cermat dan Tepat" berbeda dengan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto Nomer Urut 2 yang mengambil slogan: "Lebih Cepat Lebih Baik". Kedua-duanya tepat apabila setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat serta berbagai pertimbangan positif dan negatifnya demi kemaslahatan masyarakat luas.

12. Sabda Brahmana Raja Sepisan Dadi Tan Kena Wola-Wali

Artinya, sabda brahmana raja sekali jadi tidak boleh berubah-ubah. Mengandung makna bahwa perkataan ulama/tokoh agama dan umara/pemimpin itu harus bisa dipegang dan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sebelum diucapkan harus dipikirkan masak-masak. Dalam ilmu manajemen modern, seorang pemimpin sebelum memutuskan sebuah perencanaan kebijakan menjadi keputusan maka perlu jeda waktu untuk sosialisasi. Jeda waktu itu digunakan untuk mendapatkan saran kritik dari masyarakat serta analisis dari para pakar, sehingga setelah diketok

palu kebijakan tersebut menjadi keputusan atau undang-undang yang bersifat tetap. Dalam perkembangan terakhir, ada beberapa perundang-undangan yang mendapat tanggapan luas dari para pakar dan masyarakat, antara lain: UUNomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomer 2 Tahun 1989 serta UU Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UUNomer 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hal ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang seimbang antara DPR dan Pemerintah pada satu sisi dan masyarakat serta para pakar pada sisi lain untuk menilai dan menganalisis positif dan negatifnya suatu kebijakan sebelum diketok palu menjadi keputusan.

13. Lengser Keprabon Madeg Pandhita

Artinya, berhenti dari raja/pemimpin menjadi pertapa/ahli ibadah/sufi, dengan meninggalkan urusan dunia dan memperbanyak ibadah sebagai bekal menghadapi kematian dan kehidupan akhirat. *Lengser keprabon madeg pandhita* adalah konsep suksesi Jawa yang mengambil referensi dari cerita pewayangan. Alkisah, Prabu Kresna Dwipayana adalah raja Astina. Begitu para putranya sudah berusia dewasa dan layak untuk menduduki sebagai raja, maka dia pun mengundurkan diri sebagai raja Astina dan tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Pandu. Dia menuju Pertapan Saptaharga dan menjadi brahmana agung dengan gelar Resi Wiyasa. Setelah lengser keprabon, Resi Wiyasa tidak pernah lagi berurusan langsung dengan politik praktis tetapi berperan sebagai "guru bangsa". Dia sibuk mengajar dan sekali tempo memberi wejangan kepada para bangsawan dan satria bilamana diminta dan dianggap perlu sekali (Khakim, 2007: 90).

Konsep ini sebenarnya sudah diungkap oleh Presiden Soeharto sekitar tahun 1995-an, tetapi yang berhasil melaksanakannya malah sahabatnya, Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad, dia lengser keprabon menjadi PM dan menyerahkan jabatannya

kepada wakilnya, Abdullah Badhawi, sebelum usianya lanjut. Karena keputusannya ini, maka Mahathir tetap terhormat bahkan dia disebut sebagai guru bangsa pembangunan Malaysia. Mengapa Presiden Soeharto gagal melaksanakan konsep ini padahal selama kepemimpinannya dia selalu berpegang pada konsep kepemimpinan Jawa? Ambisi yang berlebihan serta dorongan dari keluarga maupun orang-orang di sekitarnya nampaknya mendorong Soeharto "bersedia" menjadi presiden lagi berdasarkan hasil Keputusan Sidang MPR tahun 1998. Penulis saat itu berpikir bahkan gagasan ini penulis pernah tulis dalam kartu pos dan dikirimkan ke redaksi koran, selayaknya yang terpilih menjadi Presdient RI periode 1998-2003 adalah pasangan Try Sutrisno dan BJ. Habibie. Seandainya gagasan ini terjadi maka kemungkinan krisis multidemensi dapat dihindarkan khususnya masalah disintegrasi bangsa serta dari sisi keluarga dan harta Presiden Soeharto dilindungi oleh penggantinya yang memang sebelumnya menjadi pembantu setianya. Hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun hendaknya menjadi pemimpin jangan terlalu lama antara lima hingga 25 tahun sehingga masih ada waktu masa pensiun untuk *madeg pandhita*/ guru bangsa maupun ahli ibadah serta memberi kesempatan kepada generasi penerus.

Simpulan

Jawa adalah salah satu etnik terbesar di Indonesia yang memiliki banyak kearifan lokal, salah satunya dalam konsep kepemimpinan. Dalam era demokrasi belakangan ini, maka perlu mengkaji kembali bagaimana budaya Islam-Jawa menawarkan standar kepemimpinan idealnya. Wali Songo mewariskan konsep kepemimpinan integratif, sebagaimana terangkum dalam gelar raja Demak: *Sayyidin Panata Gama, Senopati Ing Ngalogo, Khalifatullah Fil-Ardh* (Penguasa yang mengatur agama, Panglima di medan perang dan Wakil Tuhan di bumi). Dengan perpaduan itu diharapkan akan lahir pemimpin yang taat dan ahli agama, memiliki jiwa pemberani sebagai

panglima perang sekaligus bijaksana dan adil sebagai raja/penguasa sehingga mampu mewujudkan *negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta raharja*.

Daftar Pustaka

- Hidayat, Arif. 2008. *Kearifan Lokal: Delapan Watak Pemimpin Jawa*. 16 Agustus 2008. Online <http://arhidayat.staff.uui.ac.id/> Diakses 30 Oktober 2008.
- Khakim, Indy G. 2007. *Mutiara Kearifan Jawa: Kumpulan Mutiara-mutiara Jawa Terpopuler*. Yogyakarta: Pustaka Kaona.
- Soesilo. 2005. *Kejawen Filosofi & Perilaku*, cetakan ke IV Malang: Yayasan Yusula.
- Yukl, Gary. 1998. *Kepemimpinan dalam Organisasi (Leadership in Organizations) 3e*, Terjemahan Oleh: Jusuf Udaya. Jakarta: Prenhallindo.